

TINJAUAN YURIDIS TENTANG URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

VINA KARTIKASARI

0910110244



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2013

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS TENTANG URGENSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN

Identitas Penulis :

a. Nama : Vina Kartikasari
b. NIM : 0910110244
Konsentrasi : Hukum Pidana
Jangka waktu penelitian : 3 bulan

Disetujui pada tanggal : 1 Agustus 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MH

Alfons Zakaria, SH, LLM

NIP. 19540925 198003 1 002

NIP. 19800629 200501 1 002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, SH. M.Hum

NIP. 19590406 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN
JURNAL

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN**

Oleh:
VINA KARTIKASARI
NIM. 0910110244

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: 1 Agustus 2013

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH. MH
NIP. 19540925 198003 1 002

Alfons Zakaria, SH. LLM
NIP. 19800629 200501 1 002

Anggota

Anggota

Dr. Sri Lestariningsih, SH. M.Hum
NIP. 19681102 199003 2 001

Yuliati, SH. LLM
NIP. 19660710 199203 2 003

Anggota

Ketua Bagian Hukum Pidana

Paham Triyoso, SH. M.Hum
NIP. 19540517 198203 1 003

Eny Harijati, SH. M.Hum
NIP. 19590406 198601 2 001

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, SH. MM
NIP. 19660622 199002 2 001

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN**

Vina Kartikasari

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

Email: i.raikkonen@yahoo.com

ABSTRAK

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Akhir-akhir ini sering terjadi tindak pidana mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan terhadap anak didalam tindak pidana sering kali terjadi, oleh karena itu perlindungan korban tindak pidana dalam proses penyelesaian perkara pidana sangat penting bagi korban, keluarganya dan penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu pemerintah ataupun lembaga hukum lainnya haruslah benar-benar didalam penegakan berbagai masalah tindak pidana, karena anak adalah masa depan bangsa, dan peran serta masyarakat didalam mendukung para korban mendapatkan perlindungan. Permasalahan dan tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah mengidentifikasi dan menganalisa ide dasar perlunya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana serta mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan yaitu *statue approach* dan *compatitive approach*. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yaitu berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu berupa pustaka dibidang ilmu hukum dan artikel ilmiah baik dari koran maupun internet. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan akses internet. Teknik analisa bahan hukum yaitu menggunakan metode *content analysis* dan definisi konseptual yang digunakan yaitu perlindungan hukum, anak, korban, anak sebagai korban, tindak pidana dan perkosaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ide dasar perlunya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana yaitu karena: (a) Anak masih memerlukan bimbingan orang tua; (b) Anak memiliki fisik yang lemah; (c) Anak memiliki kondisi yang masih labil; (c) Anak belum bisa memilih mana yang baik dan yang buruk; (d) Anak memiliki usia yang belum dewasa; (e) Anak perempuan lebih sering menjadi korban; (f) Anak memerlukan pendidikan dan sekolah; (h) Anak memiliki pergaulan; (i) Anak masih mampu dipengaruhi mass media. Sedangkan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban yaitu: (a) upaya rehabilitasi yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun di luar lembaga; (b) upaya perlindungan pada identitas korban dari publik; (c) upaya memberikan jaminan keselamatan kepada saksi korban yaitu anak dan saksi ahli; (d) pemberian akseibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya.

Kata kunci: Perlindungan hukum, tindak pidana, korban, anak sebagai korban

**JUDICIAL REVIEW URGENCY OF LEGAL PROTECTION AGAINST CHILD
RAPE AS A CRIME VICTIM**

Vina Kartikasari

Faculty of Law, Universitas Brawijaya Malang

Email: i.raikkonen@yahoo.com

ABSTRACT

Crime means an act that the perpetrator may be subject to criminal penalties. Lately common crimes of sexual violence against children. Violence against children in the criminal act is often the case, therefore, the protection of crime victims in the criminal case resolution process is very important for the victims, their families and crime prevention. Therefore, the government or other legal institutions must be completely different in the enforcement of criminal problems, because children are the future of the nation, and the role of the community in support of the victims get protection. Problems and research objectives of this thesis is to identify and analyze the basic idea of the need for legal protection of children who are victims of crime as well as identify and analyze forms of legal protection for children who are victims of crime.

This type of research is normative. The approach used is statue of approach and compatitive approach. Types and sources of legal materials used are the primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials in the form of literature in the field of legal studies and scientific articles both in newspapers and the internet. Collection techniques used were legal materials library research and internet access. Legal materials analysis techniques that use the content analysis and conceptual definitions used are of legal protection, children, victims, children as victims, crime and rape.

The results showed that the basic idea of the need for legal protection of children as victims of crime is due to: (a) children still need parental guidance; (b) The child has a weak physical; (c) The child has a condition that is still unstable, (d) children can not choose which one is good and which is bad; (e) the child has an immature age; (f) girls are more often the victims; (g) children need education and schools; (h) children have dealings with (i) children are still able to be influenced mass media. While other forms of legal protection for child victims, namely: (a) rehabilitation efforts undertaken within the institution and outside the institution, (b) efforts to protect the victim's identity from the public, (c) an attempt to guarantee the safety of the victim-witness the child and expert witnesses; (d) provision of accessibility to obtain information about the development of his case.

Keywords: legal protection, crime, victims, children as victims, rape

PENDAHULUAN

Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa untuk Agama, keluarga, bangsa dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Di dalam diri seorang anak terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, karena anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa, maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun fisik serta sosial sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan anak terhadap pemenuhan hak anak tanpa ada diskriminasi dan kekerasan.

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.¹ Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun setelah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan – perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.²

Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur masalah mengenai anak yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

¹ Menurut Pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

² Menurut Pasal 1 butir 1 huruf a UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

dimana didalam penegakan hukumnya undang-undang inilah yang menjadi acuan dasar mengenai pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana terhadap anak. Namun, selama ini banyak berkembang pemikiran bahwa dengan telah diadilinya pelaku tindak pidana dan selanjutnya pelaku menjalani hukuman, maka perlindungan hukum terhadap korban dianggap telah sepenuhnya diberikan. Akibatnya, ketika korban kemudian menuntut adanya pemberian ganti rugi, hal tersebut dianggap merupakan tindakan yang berlebihan. Padahal, pelaku tidak cukup hanya bertanggung jawab secara pidana tetapi juga bertanggung jawab secara keperdataan supaya semakin menambah efek jera sekaligus bertanggung jawab secara pribadi kepada korban karena masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku tindak pidana saja tetapi juga korban tindak pidana. Adapun ketentuan yang mengatur tentang perlindungan korban tindak pidana melalui penggantian kerugian dapat dilihat pada pasal 14c Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada intinya menyatakan : dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat, hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian, baik semua atau sebagian yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “*subject*” tindak pidana.³ Tindak pidana merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam masyarakat yang baik dan adil, syarat utama adanya tindak pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut. Tindak pidana menurut sistem Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dibagi menjadi kejahatan atau *misdrifven* (pada pokoknya diatur dalam Buku II KUHP dan aturan – aturan lain di luar KUHP yang dinyatakan sebagai kejahatan) dan pelanggaran atau *overtredingen* (diatur dalam buku III KUHP dan di luar KUHP yang dinyatakan dalam tiap – tiap peraturan sebagai pelanggaran).

³ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Eresco: Jakarta-Bandung. 1981. Hlm. 50

Salah satu bentuk tindak pidana yang berupa kejahatan terhadap kesusilaan diantaranya adalah tindak pidana perkosaan, khususnya tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur. Kriteria anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mengenai tindak pidana perkosaan terhadap anak sudah diatur dalam KUHP yaitu terdapat didalam Pasal 285 KUHP. Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu dari tindak pidana kesusilaan. Menurut **Wirjono Prodjodikoro**⁴, Perkosaan adalah sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya (Belanda), yakni *verkrachting*, yakni perkosaan untuk bersetubuh. Perkosaan merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.

Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak – anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menayangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang – orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang – orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

⁴ Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Eresco: Jakarta. 1990. Hlm. 123

Akhir-akhir ini sering terjadi suatu tindak pidana mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan yang paling parah tindak pidana kekerasan seksual sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak. Anak dibawah umur yang dimaksud disini adalah anak yang belum berusia 18 tahun atau yang berusia dibawah 18 tahun menurut undang – undang perlindungan anak. Fenomena tindak pidana ini terus meningkat dengan berbagai modus operandi. Dengan terdapatnya perkara perkosaan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan, hal tersebut termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya yang juga dibawah umur, maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius.

Hasil penelitian kelompok studi wanita P3W (Pusat Penelitian Peranan Wanita) Universitas Brawidjaya misalnya menyebutkan, bahwa tindak kejahatan di Malang 97% korbannya adalah wanita, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual maupun lainnya. Sementara 66% pelakunya adalah laki-laki.⁵

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶ Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

Berkaitan dengan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “TINJAUAN YURIDIS TENTANG URGENSI PERLINDUNGAN

⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Refika Aditama: Bandung. 2001. Hlm. 7

⁶ Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN” .

RUMUSAN MASALAH

1. Apa urgensi perlunya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan?

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang hendak dianalisis, penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.⁷

Penelitian normatif seringkali disebut sebagai penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen perundang-undangan dan juga bahan-bahan kepustakaan,⁸ untuk itu dalam penelitian ini akan menganalisis terhadap ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 11

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali: Jakarta. 2003. Hlm. 70

⁸ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hal. 56.

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

PEMBAHASAN

A. Urgensi Perlunya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.¹⁰ Kejahatan yang terjadi di Indonesia beragam diantaranya seorang guru mencabuli anak didiknya, seorang kakek mencabuli cucunya, seorang saudara kandung merebut kehormatan adiknya, seorang ayah memperkosa anak kandungnya yang masih sd, anak membunuh ayah kandungnya dan kenakalan remaja. Inilah gambaran fenomena kejahatan di Indonesia saat ini. Oleh karena itu anak perlu

⁹ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*,. Refika Aditama: Bandung. 2008. Hlm. 34

¹⁰ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta. 1995

dilindungi oleh hukum. Faktor-faktor anak menjadi korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana sehingga perlu dilindungi yaitu:

1. Anak masih memerlukan bimbingan orang tua

Orang tua merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Orang tua yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan orang tua yang jelek akan menimbulkan pengaruh negatif pula.

Keadaan anak yang masih labil, perlu mendapatkan bimbingan orang tua untuk mencari jati diri, menghindarkan anak dari perilaku negatif. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kenakalan, dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*). Menurut Ny. Moelyatno¹¹ *broken home* seperti yang memang telah menjadi pendapat umum menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orang tua yang sangat mempengaruhi perkembangan si anak. Oleh karena itu, peran orang tua dalam membimbing si anak sangat penting karena anak masih belum tahu mana yang baik dan yang buruk sehingga orang tua perlu membimbing anak agar anak dapat berkembang dengan baik dan terjauhkan dari perilaku negatif.

2. Anak memiliki fisik yang lemah

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga. Untuk itu hak-haknya harus dilindungi.¹²

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.¹³ Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang memperngaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

3. Anak memiliki kondisi yang masih labil

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum dan juga dapat anak dapat menjadi korban tindak pidana. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya

¹¹ Ny. Moelyatno dalam Tolib Setiady. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta: Bandung. 2010. Hlm. 185

¹² Ibid. Hlm. 39

¹³ Ibid. Hlm. 2

sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan penegak hukum.

4. Anak belum bisa memilih mana yang baik dan yang buruk

Integlisia adalah kecerdasan seseorang. Menurut Wundt dan Eisler adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan.¹⁴ Anak-anak itu pada dasarnya memiliki wawasan yang kurang tajam, mereka mudah sekali menjadi korban tindak pidana dan mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk melakukan perilaku jahat. Oleh karena itu keluarga, masyarakat dan negara harus melindungi.

5. Anak memiliki usia yang belum dewasa

Stephen Hurwitz mengungkapkan usia adalah faktor yang penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan.¹⁵ Apabila faktor tersebut diikuti, maka faktor usia adalah faktor yang penting dalam hubungannya dengan sebab-sebab timbulnya kejahatan. Tidak terkecuali kejahatan yang menimbulkan korban anak atau kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak. Karena anak merupakan orang yang paling mudah untuk menjadi korban kejahatan.

6. Anak perempuan lebih sering menjadi korban

Paul W. Tappan mengemukakan pendapatnya bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari anak perempuan pada batas usia tertentu.

Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya segi kuantitas kenakalan, tetapi juga dari segi kualitasnya. Sering kali kita melihat atau membaca mass media, baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti: pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan, seperti perbuatan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

7. Anak memerlukan pendidikan dan sekolah

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah. Dengan demikian, proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak akan berpengaruh terhadap anak didik di sekolah baik secara langsung atau tidak langsung, sehingga dapat menimbulkan kenakalan (*delinquency*).

8. Anak memiliki pergaulan

¹⁴ Wundt dan Eisler dalam Nashriana. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia*. RajaGrafindo Persada: Jakarta. 2011. Hlm. 36

¹⁵ Stephen Hurwitz dalam Nashriana. *Op.Cit.*, Hlm. 37

Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih atau terancam. Mereka kemudian mencari dan masuk pada suatu keluarga baru dengan subkultur yang baru yang sudah *delinquen* sifatnya.

9. Anak masih mampu dipengaruhi mass media

Mass media dipahami berpengaruh pula terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak anak untuk melakukan kenakalan, kadangkala timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak

Pidana Perkosaan

1. Hak dan Kewajiban Anak Sebagai Korban

Hak anak yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4-17 yang meliputi:

- a. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya. Hal tersebut dimaksudkan agar anak tersebut mengetahui asal usul dan silsilah keluarganya apabila anak tersebut dalam keadaan lain karena suatu sebab diantaranya anak terlantar atau orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak dapat diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- f. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya. Yang dimaksudkan ialah setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.

- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 - 1) Diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik maupun mental anak.
 - 2) Eksploitasi dengan cara ekonomi atau seksual, misalnya tindakan memperlalat, memanfaatkan ataupun memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau kelompok.
 - 3) Penelantaran, misalnya tindakan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
 - 4) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan. Misalnya tindakan secara keji, sadis, melukai, mencederai bukan hanya fisik, akan tetapi mental dan sosial, tidak menaruh belas kasihan kepada anak.
 - 5) Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan yang lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak.
 - 6) Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh lainnya.
- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - 5) Pelibatan dalam peperangan.
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- n. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- o. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana yang dilakukan anak dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
- p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahanan upaya hukum yang berlaku;
 - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Sedangkan kewajiban anak yang terkandung di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 19 yang meliputi:

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Anak

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28B ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dan Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Serta dalam Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Berkaitan dengan hak korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui cara penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan 101 KUHP, pihak-pihak yang berkepentingan perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- 1) Kerugian yang terjadi harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri.
- 2) Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian (korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut.
- 3) Gugatan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana tadi ditujukan kepada “si pelaku tindak pidana” (terdakwa).
- 4) Dan, tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa tadi digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan.

¹⁶ R. Soeparmono. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHP*. Mandar Maju: Bandung. 2003. Hlm. 83

c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan juga mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi anak. Hal ini dapat dilihat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana hak asasi anak mendapat tempat tersendiri dalam Undang-undang ini. perlindungan terhadap keberadaan anak ditegaskan secara eksplisit dalam 15 pasal yang mengatur hak-hak anak sesuai Pasal 52 – Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Apabila anak telah menjadi korban tindak pidana maka usaha yang dilakukan menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 64 ayat (2) yang pada dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana yang meliputi:

- 1) Upaya rehabilitasi yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun di luar lembaga, usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, dan lain sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa pidana yang dialaminya.
- 2) Upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut diupayakan agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga korban tidak diketahui oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik korban dan keluarga korban tidak tercemar.
- 3) Upaya memberikan jaminan keselamatan kepada saksi korban yaitu anak dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosialnya dari ancaman pihak-pihak tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan dengan efisien.
- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya, hal ini diupayakan agar pihak korban dan keluarga mengetahui mengenai perkembangan proses perkaranya.

e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di tengah-tengah keluarga. Hal tersebut melebihi data resmi yang dikeluarkan oleh lembaga baik pemerintah maupun swasta. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Korban menurut undang-undang ini adalah *socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.

Korban kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami penderitaan/kerugian yang sangat beragam seperti materiil, fisik maupun psikis sehingga perlindungan yang diberikan kepada korban pun harus beragam pula.

f. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tidak setiap saksi atau korban yang memberikan keterangan (kesaksian) dalam suatu proses peradilan pidana secara otomatis memperoleh perlindungan seperti yang dinyatakan dalam undang-undang ini.

Khusus untuk korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tidak hanya berhak atas perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 tetapi juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial yaitu bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan lainnya untuk

memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban (penjelasan Pasal 6 huruf b).

Dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tidak menutup kemungkinan bagi korban untuk menuntut hak atas kompensasi dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7 ayat [1]). Perlindungan lain yang juga diberikan kepada saksi atau korban dalam suatu proses peradilan pidana, meliputi:

- 1) Memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa, tentunya setelah ada izin dari hakim (Pasal 9 ayat [1]);
- 2) Saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.

g. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak merupakan hukum yang khusus (*lex specialis*) dari hukum yang umum (*lex generalis*) yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁷ Dalam ketentuan UU Nomor 3 Tahun 1997 dikenal adanya pembatasan umur untuk dapat diadili pada sidang anak. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 bahwa anak yang telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin dapat dihadapkan ke sidang anak.

Dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pengadilan Pidana Anak berdasarkan UU pengadilan Anak mengarah pada tujuan “Pembinaan” dan “Perlindungan” terhadap anak. Tujuan pembinaan dan perlindungan ini dihubungkan dengan tugas dan wewenang sidang pengadilan anak yang diatur dalam Pasal 3 UU Pengadilan Anak, maka tujuan sistem peradilan pidana anak Indonesia adalah: memeriksa

¹⁷ Nashriana. *Op.Cit.*, Hlm. 75

perkara anak nakal, memutus perkara anak nakal dan menyelesaikan perkara anak nakal dalam rangka pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

h. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam UU SPPA diatur tentang eksistensi diversi. Ketentuan Pasal 1 angka 7 menyebutkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kemudian dalam Pasal 6 UU SPPA diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dalam Pasal 89 UU SPPA menyebutkan anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Ketentuan-ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 (Bab II Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979) mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan;
- 2) Hak atas pelayanan;
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup;
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama;
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan;
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan;
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan;
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus;
- 10) Hak untuk mendapat bantuan dan pelayanan.

3. Tabel Perbandingan Di Berbagai Peraturan Perundang-undangan

Nomor	Undang-undang	Bentuk Perlindungan
1.	Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD RI 1945 menjamin perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

		b. Pasal 34 UUD RI 1945: fakir miskin dan anak terlantar akan terjamin dan terlindungi di dalam kehidupannya.
2.	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 berkaitan dengan hak korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi.
3.	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak	<p>a. Pasal 11 ayat (1): usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi.</p> <p>b. Pasal 11 ayat (3): usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik didalam maupun di luar panti.</p> <p>c. Pasal 11 ayat (4): Pemerintah mengadakan pengarahannya, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.</p>
4.	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	<p>a. Pasal 1 angka 5, 6 dan 7 merumuskan bahwa perkara anak nakal harus ditangani oleh pejabat-pejabat khusus.</p> <p>b. Pasal 3: sidang pengadilan anak yang selanjutnya disebut sidang anak bertugas memeriksa perkara anak nakal, memutus perkara anak nakal dan menyelesaikan perkara anak nakal dalam rangka pembinaan dan perlindungan terhadap anak.</p>
5.	Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 66: a. setiap anak berhak untuk tidak dianiaya, disiksa atau dihukum secara tidak manusiawi; b. Setiap anak berhak untuk tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum; d. Setiap anak berhak untuk tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara secara melawan hukum

		atau jika sebagai upaya terakhir; e. Setiap anak berhak untuk diperlakukan secara manusiawi dalam proses peradilan pidana; f. Setiap anak berhak untuk hak atas bantuan hukum, untuk membela diri dan memperoleh keadilan di Pengadilan Anak yang bebas dan tidak memihak.
6.	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Pasal 64 ayat (3) tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana: a. upaya rehabilitasi baik didalam lembaga maupun diluar lembaga; b. upaya perlindungan pada identitas korban dari publik; c. upaya memberikan jaminan keselamatan sebagai saksi korban; dan d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya.
7.	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	a. Pasal 21: Korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. b. Pasal 22: Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pasal 24: Korban berhak mendapatkan pelayanan bimbingan rohani.
8.	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban	a. Pasal 6 huruf b: saksi dan korban berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. b. Pasal 7 ayat (1): korban dapat menuntut hak atas kompensasi dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. c. Pasal 9 ayat (1): saksi dan korban dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa, setelah ada izin dari hakim apabila

		saksi dan korban merasa terancam jiwanya.
9.	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 89 menyebutkan anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Pasal 90 ayat (1): anak korban dan saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan

Ide dasar perlunya perlindungan hukum terhadap anak menjadi korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana sehingga perlu dilindungi yaitu: (a) Anak masih memerlukan bimbingan orang tua; (b) Anak memiliki fisik yang lemah; (c) Anak memiliki kondisi yang masih labil; (d) Anak belum bisa memilih mana yang baik dan yang buruk; (e) Anak memiliki usia yang belum dewasa; (f) Anak perempuan lebih sering menjadi korban; (g) Anak memerlukan pendidikan dan sekolah; (h) Anak memiliki pergaulan; (i) Anak masih mampu dipengaruhi mass media.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana Perkosaan

Upaya perlindungan yang diberikan pemerintah kepada anak yang menjadi korban yaitu upaya rehabilitasi yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan pada identitas korban

dari publik, upaya memberikan jaminan keselamatan kepada saksi korban yaitu anak dan saksi ahli, dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya.

Terdapat beberapa perundang-undangan yang mengatur tentang bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban, yaitu: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

B. SARAN

1. Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari.
2. Aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban.
3. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).
4. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan dalam perkara belum sepenuhnya terpenuhi, karena dalam Pasal 81 dan Pasal 82 belum melindungi korban secara khusus, di dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 ternyata belum mengatur tentang ganti rugi yang

dapat diajukan oleh korban. Dengan demikian berarti Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 perlu diperbaharui agar memuat ketentuan ganti rugi yang dapat diajukan oleh korban.

5. Kepada masyarakat untuk lebih mengawasi dan memberikan pendidikan kepada putra-putrinya khususnya remaja putri dalam pergaulan bebas untuk menghindari supaya tidak menjadi korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama

Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco

----- . 1990. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: Eresco

Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta

Soeparmono. 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHP*. Bandung: Mandar Maju.

Soerjono dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak